



**RELASI KUASA MEDIA, NEGARA DAN ULAMA DALAM
NARASI TESTIMONIAL ULAMA DAYAH TERHADAP
VAKSINASI MASYARAKAT ACEH**

Peneliti

Ketua
Darmadi : Id: 200807760304000
Anggota
Muhammad Ikhsan : Id: 213009850104000

Klaster	Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
Bidang Ilmu Kajian	Dakwah dan Komunikasi

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE
OKTOBER 2022**

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Relasi Kuasa Media, Negara Dan Ulama Dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh
2. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
3. Bidang Keilmuan : Dakwah dan Komunikasi
4. No. Reg Penelitian : 22116000052741

B. Ketua Peneliti

1. Nama : Dr. Darmadi, M. Si
2. NIP/NIDN : 197607082005011004/2008077603
3. No. Reg. Peneliti : 200807760304000
4. Jab. Fungsional : Lektor
5. Jurusan/ Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

C. Anggota Peneliti

1. Nama : Muhammad Ikhsan, MA
2. NIP/NIDN : 2130098501
3. No. Reg. Peneliti : 213009850104000
4. Jab. Fungsional : Asisten Ahli
5. Jurusan/ Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

D. Jangka waktu Penelitian : 8 Bulan

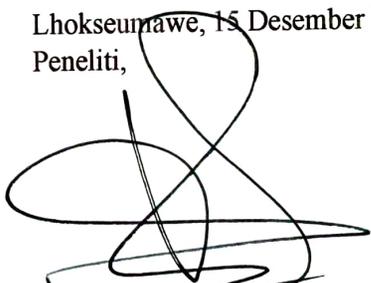
E. Anggaran

1. Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2022
2. Jumlah Anggaran : 35.000.000

Mengetahui
LPPM IAIN Lhokseumawe
Sekretaris,


LPPM Mid Alwi, MA
NIP. 197905152005011009

Lhokseumawe, 15 Desember 2022
Peneliti,


Dr. Darmadi, M. Si
NIP. 197607082005011004

Menyetujui:

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Rektor,



Dr. Damal, M. Ag

NIP. 197602262000031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Darmadi, M. Si
NIP/NIDN : 197607082005011004/2008077603
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Institusi : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Lhokseumawe

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul “Relasi Kuasa Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh” merupakan karya asli saya bersama tim peneliti berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan tersebut telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam daftar referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikianlah surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, 12 Desember 2022



Dr. Darmadi, M. Si
NIP. 197607082005011004

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
Abstrak.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Literatur Review yang Relevan	4
F. Kajian Teori	6
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Teori Relasi Kuasa Foucault.....	9
B. Relasi Kuasa dan Narasi Media	16
C. Relasi dan Kuasa Negara dalam Konstruksi Berita	25
D. Relasi Negara dan Ulama di Indonesia.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Relasi Kuasa Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh.....	36
B. Konstruksi Media terhadap narasi testimonial Ulama dayah terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh.....	42
C. Respons masyarakat Aceh terhadap konstruksi media massa dalam testimonial Ulama Dayah Aceh terkait Vaksinasi Covid 19.....	46
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

Daftar Pustaka.....	51
---------------------	----

Abstrak

Penelitian berusaha menjelaskan relasi kuasa yang terbentuk dari ketiga aktor Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi analisis wacana foucoult, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang terbentuk dari ketiga aktor Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh ini berasal dari sinergi antara media, Negara (pemerintah Aceh) dan ulama serta partisipasi oleh masyarakat. Terdapat relasi antara ulama dan negara baik dalam bentuk invisible power dan Power Knowledge serta kontestasi opinion leader bekerja pada relasi antara media, negara dan ulama dalam narasi vaksinasi. Interaksi yang terjadi ulama, negara dan masyarakat lebih bersifat kolaboratif dan saling menguntungkan (simbiosis interaksionis). Bekerjanya relasi kuasa pada Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh menggunakan, Power Knowledge dan opinion leader serta invisible power agar sadar melakukan vaksin. Relasi yang terbentuk anatar Ulama dan Masyarakat lebih bersifat kolaboratif dan saling mendukung satu sama lain dan bersifat asosisatif. Konstruksi berita vaksinasi masyarakat Aceh pada media serambi Indonesia tidak memiliki relasi kuasa dengan pemerintah, disebabkan tidak ditemukannya intervensi pemberitaan mengenai Covid 19. Kuasa pengetahuan menjadi respon masyarakat Aceh untuk melakukan vaksin. Stimulus kuasa pengetahuan mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Negara, Media, Ulama dan Vaksin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Althusser, media berada di tengah-tengah realitas sosial yang penuh dengan kepentingan, konflik, dan kebenaran fakta yang rumit dan beragam. Media dewasa ini tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian pesan, juga menjadi sarana mempengaruhi opini dan sikap publik. Inilah yang akhirnya menimbulkan bias media, di mana media yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi yang merepresentasi aspirasi publik, malah menjadi pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik pribadi, golongan dan kelompok. Realitas media yang tercipta tidak terlepas dari kepentingan. (Nugroho, 2018).

Media dapat digunakan untuk mendominasi, mengarahkan, merekonstruksi, dan menanamkan ideologi tertentu. Media telah berkembang pesat menjadi sarana untuk membangun legitimasi kekuatan politik dan ekonomi. (Farid, 2019). Bagi negara, media dimanfaatkan sebagai kekuatan politik untuk menciptakan citra positif dan mempengaruhi sikap dan opini publik. Bagi pemegang saham, media dijadikan sebagai alat untuk membangun kerajaan ekonomi.

Pengaruh pemilik modal serta pemilik media telah mengganggu independensi dan netralitas organisasi media. Dalam mengembangkan kebijakan redaksional dan editorialnya, media massa mengalami tekanan ekonomi dan politik. Catrina menyebutkan bahwa media kesulitan memisahkan kepentingan politik dalam setiap pemberitaan karena adanya afiliasi partai. Intervensi pemilik modal terhadap konten media tidak hanya merugikan fungsi media massa, tetapi juga berdampak negatif bagi tumbuhnya independensi media dan menghambat pergerakan media sebagai pilar demokrasi. (Negara & Rusadi, 2020).

Media dan Negara memiliki relasi kuasa dalam upaya mendapatkan legitimasi untuk setiap tindakan dan aktivitas pemerintah yang memerlukan pembenaran dari masyarakat. Media juga dimanfaatkan oleh negara sebagai upaya konstruksi narasi dalam mendapatkan dukungan politik serta mewujudkan citra positif. (Negara & Rusadi, 2020). Setiap narasi adalah perjuangan tekstual baik ucapan maupun tulisan untuk membuat sesuatu hal dapat diterima atau ditolak dan ditunda dalam ruang sosial. (Asril, 2013).

Fenomena Vaksinasi Covid 19 di Aceh yang memunculkan beragam perspektif. Kontestasi informasi terkait halal haram Vaksin, aman dan tidak aman Vaksin menjadi

wacana (episteme) yang berkembang ditengah masyarakat Aceh. Dalam pandangan Teori Relasi Kuasa Foucault (Foucault, 2002) berpandangan bahwa pengetahuan dan kuasa memiliki kaitan yang sangat erat. Pengetahuan muncul dari relasi kuasa, dan relasi kuasa melahirkan pengetahuan. Menurut Foucault kuasa bukan hanya sekedar tentang kepemilikan dan bentuk otoritatif semata, tapi kuasa dilihat oleh Foucault adalah sebagai pengetahuan (episteme) atau wacana yang ada dimana-mana dan menyebar serta memiliki relasi-relasi pengetahuan antar manusia yang bermuara pada kebenaran. Kuasa bukan tentang milik tapi strategi membentuk wacana tentang sesuatu yang diyakini, diharapkan dan menjadi sebuah keputusan (*normalization power*). (Kebung, 2017).

Narasi testimonial Ulama dayah Aceh pada beberapa media cetak dan online, tentang vaksinasi Covid 19 mengundang pertanyaan kritis untuk menemukan jawaban tentang relasi kuasa media, negara dan ulama dayah Aceh. Apakah mungkin, testimonial ulama ini adalah salah satu bentuk White Propaganda yang dikemukakan oleh Lasswell ? atau Ulama adalah relasi kuasa media dan pemerintah Aceh (negara) dalam membentuk pengetahuan (opini dan sikap) masyarakat terkait Vaksinasi Covid 19 ? Atau testimonial ulama dayah Aceh ini juga bagian dari kuasa pribadi Ulama terhadap legitimasi pengetahuan halal haram, aman dan tidak amannya vaksin Covid 19 ?

Pertanyaan kritis ini muncul atas dasar fenomena penolakan vaksinasi Covid 19 masyarakat Aceh¹ dengan maraknya pemberitaan para ulama Dayah Aceh yang mendukung Vaksinasi Covid 19 dengan beragam narasi testimonial ulama yang muncul keruang publik. Sebagai contoh adalah pemberitaan di beberapa media terkait pernyataan ulama Dayah Aceh yang mendukung Vaksinasi Covid 19, sebagaimana diutarakan oleh Waled Nuruzzahri Pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga.²

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, mengajak masyarakat Aceh melalui media agar proaktif berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19. Menurutnya, Vaksin Sinovac Halal karena telah teruji dan mengajak masyarakat Aceh untuk tidak ragu menggunakan vaksin. Selain itu, Pada beberapa Baliho di ibu kota dalam kabupaten kota di Aceh juga diwarnai dengan pernyataan/testimonial para ulama

¹ Baca Berita Kompas.co tanggal 28 Juli 2021: Banyak Warga Aceh Menolak di Vaksin. Covid19.go.id juga memberitakan terkait Rakyat Aceh yang menolak Vaksin karena menyebarnya hoaks yang mengatakan vaksin haram menurut para ulama Aceh. Kemudian berita pada rmolaceh.id warga Abdiya Bubarkan Kegiatan Vaksinasi Covid 19 yang dimuat pada edisi Selasa 28 September 2021.

² Baca SerambiNews.com: Ulama Aceh Dukung Gerakan Vaksinasi di Lingkungan Dayah.

dayah Aceh yang mendukung dan mengajak masyarakat untuk melakukan Vaksinasi Covid 19. Ulama yang memberikan testimonial mulai dari Abu Tumin, Abu Cot Tarom, Abati Lhok Mon Puteh, dan para ualama lainnya. Beberapa pernyataan Ulama tersebut tentu mengandung wacana yang memerlukan kajian mendalam untuk menemukan relasi kuasa wacana, pengetahuan dan masyarakat serta melihat dimensi relasi media, ulama dan negara.

Berdasarkan latar belakang si atas, fenomena testimonial Ulama dayah Aceh tentang Vaksinasi Covid 19 yang dibedah menggunakan pisau analisis teori kuasa Foucault menimbulkan beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban ilmiah. Foucault berpandangan bahwa kuasa, pengetahuan dan realitas sosial masyarakat memiliki korelasi yang signifikan. Sebab itu fenomena di atas akan diteliti dalam sebuah penelitian dengan judul *Relasi Kuasa Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana relasi Kuasa Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh?
- B. Bagaimana Media mengkontruksi narasi testimonial Ulama dayah terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh?
- C. Bagaimana respons masyarakat Aceh terhadap konstruksi media massa dalam testimonial Ulama Dayah Aceh terkait Vaksinasi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan relasi Kuasa Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh
2. Memahami dan menjelaskan media mengkontruksi narasi testimonial Ulama dayah terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh
3. Menjelaskan respons masyarakat Aceh terhadap konstruksi media massa dalam testimonial Ulama Dayah Aceh terkait Vaksinasi Covid 19

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penambah khazanah keilmuan dibidang studi Islam, negara dan masyarakat serta khazanah ilmu komunikasi dalam kajian narasi dan kuasa wacana. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Indonesia dalam membentuk opini publik terkait dengan kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi Covid 19 sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Aceh dan Indonesia.

E. Literatur Review yang Relevan

Beberapa literatur review yang relevan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan gap penelitian dan distingsi dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Priyanto dengan judul *Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucolt*. Penelitian ini menjelaskan bahwa penodaan Agama yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta yang juga calon Gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan awal dari serangkaian polemik sepanjang proses Pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Kasus ini memicu gesekan antara masyarakat Islam sebagai masyarakat sipil dan pemerintah sebagai otoritas. Penelitian ini mengeksplorasi kasus ini dengan menggunakan teori relasi kekuasaan Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan massa masyarakat Islam adalah kekuatan dari pengetahuan masyarakat Islam. Struktur kekuasaan mencoba mendisiplinkan gerakan ini dengan hegemoni dalam bentuk wacana. Namun, wacana hegemonik dari masyarakat sipil (*Islamic society*) juga mencoba menantang. Pertarungan hegemonik dalam bentuk wacana menjadi begitu viral di semua media, elemen dan institusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana Pemimpin dan Kebhinekaan merupakan kekosongan penanda yang merupakan kontestasi pemberian makna. (Priyanto, 2017)
2. Penelitian dengan judul *Menciptakan Muslim Modern: Relasi Kuasa Islam dan Negara Indonesia Modern* yang ditulis oleh Mohamad Hudaer menyatakan bahwa pemahaman gerakan reformasi Islam di era modern tidak lepas dari hubungannya dengan kekuasaan negara-bangsa. Tulisan ini berusaha menganalisis artikulasi Islam di Indonesia modern yang berusaha muncul dari dikotomi antara sekuler-modern dan tradisional-agama. Hudaer berpendapat bahwa tujuan gerakan pembaruan neo-modernisme bukan hanya

untuk merekonstruksi pertanyaan tentang 'bagaimana' memahami Islam, tetapi juga menyiratkan 'siapa' Muslim modern itu. Yang pertama berkaitan dengan perlunya rekonstruksi ortodoksi Islam, sedangkan yang kedua berkaitan dengan mentalitas umat Islam di era modern ini. Perlunya rekonstruksi kedua hal tersebut berkaitan dengan sistem kekuasaan negara modern yang berbeda dengan sistem kekuasaan yang diterapkan pada masyarakat pra-modern. Tulisan ini menjelaskan pemikiran para pembaharu Islam di Indonesia yang mengimplikasikan konstruksi subyek Muslim modern dan kaitannya dengan sistem kekuasaan negara modern.(Hudaeri, 2018)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Konrad Kebung dengan judul Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia. Penelitian ini menyajikan pemikiran ambisius Foucault tentang berbagai peristiwa sejarah di masa lalu dan melihat bagaimana orang menghadapi dan bereaksi terhadap semua peristiwa ini dalam berbagai era pemikiran, cara hidup, budaya, dan latar sejarah. Dia bekerja dengan peristiwa masa lalu, namun tujuannya adalah untuk membentuk sejarah masa kini. Analisisnya yang kaya dalam karya-karyanya diklasifikasikan dalam tiga poros utama, yaitu poros pengetahuan, poros kekuasaan, dan poros etika atau subjek. Kebung juga menyajikan gagasan Foucault tentang kekuasaan seperti yang dipraktikkan sepanjang sejarah sistem pemikiran, dan bagaimana cara berpikir ini dapat dibaca dalam kekuatan politik apa pun, atau bagaimana pemikiran Foucault dapat dilihat sebagai kritik terhadap berbagai kekuatan represif dipraktekkan di mana-mana, termasuk di Indonesia.(Kebung, 2017)
4. Penelitian dengan judul Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif yang dilakukan oleh Abdul Firman Ashaf. Penelitian ini menjelaskan relasi media, negara, dan masyarakat dalam teori strukturasi Anthony Giddens. Data dikumpulkan dari studi kepustakaan. Teori strukturasi menunjukkan bahwa hubungan media, negara, dan masyarakat merupakan praktik sosial, tidak ditentukan oleh negara atau kelas dominan karena media selalu ada dalam dinamika, likuid, dan situasi. Dalam situasi historis tertentu, media dapat mereproduksi artikulasi ideologi negara, tetapi dalam situasi lain dapat membuat strategi perlawanan. (Ashaf, 2017)

Penelitian tersebut di atas mengkaji relasi agama dengan negara dan relasi media, negara dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini yang mengkaji relasi kuasa media, ulama dan negara (Pemerintah Aceh). Beberapa literatur yang telah

ditelaah, belum ditemukan adanya kesamaan penelitian. Penelitian ini memiliki distingsi kuat melalui mata pisau kajian relasi kuasa Foucault yang digunakan pada Ulama Dayah Aceh dalam testimonialnya terkait vaksinasi masyarakat Aceh. Selain itu, penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana testimonial Ulama Dayah ini dibaca dalam perspektif komunikasi propaganda Harold Lasswell serta relasi wacana dalam narasi testimonial Vaksinasi ditinjau dalam perspektif relasi kuasa dan pengetahuan Foucault.

F. Kajian Teori

1. Teori Relasi Kuasa Foucault

Michel Foucault adalah seorang pemikir postmodernis yang menghasilkan ide-ide dan konsep-konsep khas yang memiliki dampak signifikan pada evolusi pengetahuan manusia. Kritiknya yang tajam dan kritis menambah dimensi baru pada pemikiran dan studi ilmiah bidang sosial humaniora dalam berbagai topik, seperti sejarah, budaya, kekuasaan, dan pengetahuan. Teori Foucault banyak digunakan sebagai lensa dan pisau analisis untuk melihat berbagai fenomena sosial, termasuk konstruksi sosial, struktur kurikulum, politik, medikalisasi masyarakat, dan seksualitas. Banyak ide kritis dan kontroversial lahir dari karya-karyanya selama abad kedua puluh.

Teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault yang menjelaskan kuasa berbeda dengan konsep kuasa pada umumnya. Kuasa menurut Foucault bukanlah milik para raja, penguasa atau pemerintah. Kuasa memiliki serangkaian regulasi rumit yang saling mempengaruhi. Kuasa menempati posisi-posisi strategis yang berkaitan satu sama lain. (K. Bertens, 2001). Foucault menolak pandangan Marxist yang menganggap kuasa bersifat subjektif yang memandang bahwa seseorang atau kelompok menguasai yang lain atau sebaliknya. Akan tetapi Foucault memandang bahwa kuasa bersifat positif dan produktif. Kuasa memproduksi realitas, lingkup objek dan ritus-ritus kebenaran. Kuasa berjalan melalui normalisasi dan regulasi. (Priyanto, 2017).

Foucault tidak menjelaskan defenisi kuasa, karena menurutnya ada yang lebih penting dari menjelaskan pengertian kuasa yaitu mengeksplorasi fungsi kuasa. Kuasa ada dimana-mana, karena kuasa memiliki dimensi relasi. Menurut Foucault dimana ada relasi disana ada kuasa. (Syafiuddin, 2018). Kekuasaan menurut Foucault tidak berpusat pada satu subjek, namun dapat tersebar dimana-mana dalam relasi sosial. Kekuasaan, menurut

Foucault, memiliki kaitan kuat dengan pengetahuan. Kekuasaan melahirkan pengetahuan, dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan.

Dengan kata lain, Foucault menjelaskan pengetahuan sebagai episteme, yang merupakan semacam pengetahuan atau informasi otoritatif yang telah dibentuk sebagai makna untuk situasi tertentu di era tertentu. Episteme bukan lagi sekedar sudut pandang dalam melihat perbedaan antara yang benar dan yang jahat, tetapi juga dalam hal memisahkan apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin, atau apa yang normal dan menyimpang untuk dilakukan atau diyakini oleh subjek. Dengan demikian, Kekuasaan menurut Foucault memiliki korelasi dengan realitas soaial yang membentuk wacana, pengetahuan dan kebenaran. Menurut Foucault, pengetahuan dan kekuasaan bekerja melalui bahasa. Sebab, pada tingkat yang paling mendasar, ketika seorang belajar berbicara, ia menerima pengetahuan dasar dan aturan-aturan kebudayaan pada waktu yang sama.(Syahputra, 2017).

2. Media dalam Perspektif Relasi Kuasa Foucault

Teori Michel Foucault tentang Pengetahuan dan Kekuatan juga digunakan dalam kajian media untuk menganalisis fenomena industri media. Sebagai intelektual kontemporer, pemikiran Foucault memiliki gaya postmodernisme yang unik. Pemikirannya telah melampaui teori kritis tradisional yang mencoba mengungkap relasi kekuasaan dan ekonomi di balik ideologi media. Pemikiran Foucault telah memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana media menghasilkan kebenaran di bawah proses kontrol yang ketat menjadi sesuatu yang tampak normal. Dengan asumsi media memiliki kekuatan untuk menciptakan budaya massa, yang harus dikaji secara kritis dengan pendekatan literasi media, pemikiran Foucault telah memberikan ruang diskursif baru. Sebuah alternatif pemikiran bagaimana menaksir kerja media massa sebagai pengawas kebenaran dan pencipta informasi melalui praktik normalisasi.(Syahputra, 2017).

Menurut Foucault, pengetahuan dan kekuasaan bekerja melalui bahasa. Dalam kajian media, bahasa, tulisan, pilihan kata, dan struktur gramatikal, menurut Eriyanto, dipandang sebagai pilihan yang diartikulasikan membawa makna ideologis tertentu.(Eriyanto, 2005). Sementara Nurudin, menjelaskan bahwa penyampaian teks melalui saluran komunikasi massa mempunyai efek yang berwujud pada tiga hal, yaitu efek kognitif (pengetahuan),

afektif, (emosional dan perasaan), dan behavioral (perubahan pada tingkah laku). (Nurudin, 2014).

Sejalan dengan teori kuasa Foucault bahwa kuasa membentuk pengetahuan. Kekuatan media, menurut Foucault, adalah menciptakan wacana kebenaran baru atau menegaskan wacana kebenaran yang sudah mapan. Akibatnya, kita tidak akan pernah sampai pada 'esensi kebenaran' karena kita hanya berkuat pada 'eksistensi kebenaran'. Dalam hal ini, kekuatan media menjadi pedang bermata dua, satu sisi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan fakta baru, seperti konten kekerasan dan pornografi sebagai perilaku media yang dapat diterima. Media, di sisi lain, dapat berfungsi sebagai perlawanan terhadap kebenaran lama yang dominan. Setiap kekuasaan memiliki tendensi memproduksi kebenaran melalui penyebaran wacana. Diskursus Foucauldian selanjutnya akan mengetengahkan betapa pentingnya sebuah wacana dalam menyusun pengetahuan bahkan memproduksi suatu kebenaran. Media adalah salah satu sarana pembentuk wacana, praktek ideologis media menjadikan media sebagai kekuatan mekanik mengkonstruksi kebenaran. (Syahputra, 2017).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan di bahas dalam beberapa bab untuk menjawab rumusan masalah secara ilmiah. Bab I adalah pendahuluan yang meliputi pembahasan dan penjelasan masalah yang ditulis dalam latar belakang masalah. Kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab I ini juga dijelaskan distingsi penelitian dengan menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta menjelaskan secara operasional metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena testimonial Ulama Dayah Aceh terkait vaksinasi. Kemudian bab II menjelaskan teori yang relevan untuk penelitian, yaitu teori relasi kuasa Foucault dan teori media massa yang meliputi teori media Marxis, Althusser dan Gramsci. Bab III adalah inti pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian. Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan relasi kuasa media, ulama dan negara terkait fenomena vaksin masyarakat Aceh. Lebih lanjut juga menjawab pertanyaan penelitian terkait konstruksi narasi testimonial Ulama dayah dan kuasa ulama dan Pemerintah Aceh mempengaruhi opini publik Masyarakat terkait Vaksinasi Covid 19. Bab IV adalah penutup yang menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran dan rekomendasi serta limitasi penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Relasi Kuasa Foucault

Tulisan-tulisan Foucault menunjukkan bahwa masalah kekuasaan telah memenuhi pikirannya sepanjang karir intelektualnya. Foucault terkenal sebagai seorang filsuf dan sejarawan. Ide-idenya, memiliki dampak yang cukup besar pada disiplin sosial lainnya, termasuk antropologi dan sosiologi. Foucault tidak mempelajari sejarah untuk belajar tentang kehidupan individu-individu besar atau yang berkuasa pada waktu tertentu; sebaliknya, ia mempelajari sejarah masa kini (*history of the present*).

Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini (*what is today?*), yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan sejarah masa lalu dilakukan untuk mencari retakan suatu zaman (*discontinuity*) sebagai usaha untuk menemukan rezim pengetahuan (*episteme*) apa yang berkuasa pada masa tertentu (*archeology of knowledge*), dan bagaimana beroperasinya kekuasaan (*geneology of power*) itu kini. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat, tetapi menyebar (*omnipresent*) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan.

Disiplin merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu. Beroperasinya kekuasaan yang dilegitimasi oleh rezim pengetahuan tertentu sebagai normalisasi itu juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas, yakni terhadap tubuh sosial (*population*). Persoalan ini dibahas oleh Foucault secara intensif dalam beberapa tulisan dan ceramahnya sebagai suatu konsep *governmentality*. Ini tentu saja berbeda dari pengertian kekuasaan yang umum dipahami dalam sosiologi politik sebagai suatu atribut dengan kajian yang bersifat makro. Tulisan ini mengkaji bagaimana teori kekuasaan Foucault itu dibangun, bagaimana ia menjadi tantangan bagi sosiologi politik dan kajian kebudayaan, serta bagaimana tantangan itu direspons oleh keduanya.

Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan menjadi tema sentral dalam seluruh studi yang dilakukan Foucault sepanjang karier intelektualnya. Meski demikian, dari seluruh karyanya, jarang sekali sebenarnya Foucault menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan secara eksplisit. Beberapa tulisan dan wawancara dengan Foucault yang terhimpun dalam sebuah buku *Power/Knowledge* berusaha menunjukkan relasi kekuasaan dan pengetahuan secara eksplisit. Namun, baik melalui wawancara maupun tulisan dan

ceramah kuliahnya, tidak ada pembicaraan secara spesifik hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan selain ia menjadi simpulan tematik dari editor buku tersebut. Persoalan ini pada akhirnya menyulitkan untuk memahami hubungan kekuasaan dan pengetahuan, meski Foucault sebenarnya juga telah menunjukkan hubungan tersebut dalam karya-karya awalnya. (Kamahi, 2013).

Menurutnya, apa lagi yang dibicarakan dalam tema-tema seperti kegilaan, disiplin, dan seksualitas selain sebagai beroperasinya jalinan antara kekuasaan dengan pengetahuan. Foucault lebih intens membicarakan kekuasaan secara tematik daripada membicarakan pengetahuan. Oleh karena itu, pada bagian ini, tema tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan akan didiskusikan bertolak dari konsepsi Foucault tentang kekuasaan.

Dalam bukunya *The History of Sexuality Vol. I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni (1990:94-95):

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary opositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalanpun untuk keluar darinya.

Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan menjadi tema sentral dalam seluruh studi yang dilakukan Foucault sepanjang karier intelektualnya. Meski demikian, dari seluruh karyanya, jarang sekali sebenarnya Foucault menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan secara eksplisit.

Dalam hal ini Foucault juga memperluas cakupan penelitiannya pada bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, tidak hanya menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam

kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, perhatian Foucault selanjutnya adalah menyelidiki bagaimana teknologi kekuasaan berlaku dalam pembentukan kontrol sosial. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan bentuk kekuasaan itu sebagai *disciplinary power*, dan teknologi kekuasaan beroperasi melalui pendisiplinan tubuh. Metode yang digunakan bukan lagi arkeologi, melainkan *genealogy of power*. (Mudhoffir, 2013)

Analisis genealogi Foucault dimulai dengan penyelidikan mengenai karakteristik relasi kekuasaan (*power relations*) dalam dunia modern yang bertolak dari pertanyaan “bagaimana beroperasinya kekuasaan” dan bagaimana melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Dalam pandangan Foucault, tidak ada model general hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap zaman selalu memiliki karakteristik hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Inilah yang menggugah Foucault mencuplik genealogi sebagai perangkat analisisnya yakni untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan. Berbeda dengan metode analisa yang digunakan oleh Foucault sebelumnya dari beberapa karya awalnya yang menggunakan analisa arkeologi, dalam *Archeology of Knowledge, Madness and Civilization* dan *The Order of Things* yang terbatas pada persoalan struktur wacana dalam pembentukan disposisi pengetahuan, melalui *genealogy of power* ia memluas penyelidikannya pada teknologi kekuasaan.

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Cronin (1996) menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantif—tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap—subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.

Yang pertama, pandangan tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain, abai terhadap fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (*sovereignty*) dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (*legitimate*) dijalankan terhadap yang

lain berdasarkan suatu konsensus. Akan tetapi, menurut Foucault, konsep kekuasaan ini tidak dapat menangkap kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat modern.

Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan *sovereign power* tetapi *disciplinary power*. *Disciplinary power* bukan konsep tentang kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain melainkan ia berfungsi dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, tetapi mengenai normalisasi kelakuan yang didisain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh.

Yang kedua, terjadi pula pergeseran fokus analisa kekuasaan, dari analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh. *Disciplinary power* beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (*vehicle of power*). *Sovereign power* itu negatif, menundukkan perilaku melalui kepatuhan terhadap hukum, sementara *disciplinary power* produktif, mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh. Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan.

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok. Demikian menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus dipahami:

“... power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general

designor institutional crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony."(Foucault 1990: 92-93).

Pada konteks negara, *disciplinary power* berlangsung dalam institusi-institusi tertutup sebagai mekanisme pengendalian individu agar dapat memberikan kegunaan bagi kepentingan negara atau pemerintah. Model kekuasaan ini sudah dapat ditemui dalam masyarakat Eropa sekitar abad 18an. Akan tetapi, dalam hal ini negara tidak hanya menjalankan model kekuasaan *disciplinary power*, tetapi juga sebagaimana konsepsi Weber tentang kekuasaan, negara menjalankan kekuasaan menggunakan model *sovereign power*, yang melandaskan legitimasi operasinya pada keabsahan hukum dan kewenangan atau hak negara dalam mengatur warganya dan sumber dayanya. Tidak seperti *disciplinary power* di mana kekuasaan dijalankan melalui cara- cara yang seringkali tidak diketahui subjeknya, *sovereign power* justru dijalankan oleh negara melalui cara-cara yang negatif. Represi dan dominasi menjadi bagian dari proses pengendalian warga negara oleh negara. Cara-cara yang negatif itu dijalankan karena negara dipandang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan itu.

Dalam masyarakat modern kini, menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *sovereign power* atau *disciplinary power*, tetapi justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara yang positif. Substansinya sebenarnya sama dengan *disciplinary power*, yakni kekuasaan itu dijalankan terhadap tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang patuh dan berguna yang hanya dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu. *Governmentality* adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk *disciplinary power*. Jika objek *disciplinary power* adalah tubuh individu, maka subjek *governmentality* adalah populasi (tubuh sosial). Bentuk pengetahuan dalam model *disciplinary power* berupa rezim kebenaran, sedangkan pada *governmentality* berupa politik ekonomi. Oleh karena *governmentality* adalah perluasan model kekuasaan *disciplinary power* pada level negara, maka yang dibicarakan dalam *governmentality* adalah isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara.

Governmentality adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau *legitimate*. Dengan ini, kekuasaan yang dijalankan negara tidak akan melahirkan anti-kekuasaan. Praktik *governmentality* mengaburkan beroperasinya kekuasaan terhadap populasi. Melalui *governmentality*, kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial seperti halnya model *disciplinary power* yang

menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu.

Governmentality ini disebut juga sebagai *conduct of conduct*. Artinya, negara mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh. Sebagai bentuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, *governmentality* tidak lain dapat juga dipandang sebagai suatu cara yang *legitimate* dan benar dalam mengatur sesuatu, yakni populasi dan sumber daya (*the right manner of disposition of things*).

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*),

Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis.

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Cronin (1996) menunjukkan

pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantif tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.

Yang pertama, pandangan tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain, abai terhadap fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (sovereignty) dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (legitimate) dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus. Akan tetapi, menurut Foucault, konsep kekuasaan ini tidak dapat menangkap kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan sovereign power tetapi disciplinary power.

Disciplinary power bukan konsep tentang kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain melainkan ia berfungsi dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, tetapi mengenai normalisasi kelakuan yang didisain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh.

Yang kedua, terjadi pula pergeseran fokus analisa kekuasaan, dari analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh. Disciplinary power beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (vehicle of power). Sovereign power itu negatif, menundukkan perilaku melalui kepatuhan terhadap hukum, sementara disciplinary power produktif, mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh. Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan.

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk

kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

Demikian menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus dipahami: *power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony.*" (Foucault 1990).

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya.

B. Relasi Kuasa dan Narasi Media

Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang powerful sementara yang lain powerless. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (omnipresent), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaknampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun. Dalam bukunya *The History of Sexuality Vol. I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni (1990:94-95):

Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.

Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Pengetahuan sebagai bentuk kekuasaan jauh sebelum Foucault berbicara secara eksplisit mengenai isu kekuasaan, fokus perhatian pada karya-karya awalnya adalah pada sejarah pengetahuan. Namun yang menjadi perhatiannya bukan penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin ilmu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai sebuah episteme, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu. Penyelidikan sejarah ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yakni konsep -konsep atau pernyataan-pernyataan, terorganisasi secara tematis sehingga ia menjadi otoritatif dan legitimate dalam menerangkan segala sesuatu. Struktur pengetahuan yang otoritatif dan legitimate ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertindak sebagai sebuah rezim pengetahuan. Dalam karya awalnya, *The Archeology of Knowledge*, struktur pengetahuan ini disebut pula sebagai suatu formasi wacana.

Pengertian arkeologi pada karya tersebut tidak merujuk sebagai suatu metode penggalian sejarah antropologis yang mengandaikan bahwa sejarah (dalam hal ini adalah sejarah pengetahuan) berkembang secara linear. Suatu bentuk pengetahuan, dalam pandangan

Foucault, dari masa ke masa bukan suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana. Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai episteme. Episteme merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman. Dalam studinya tentang kegilaan, misalnya, Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaannya terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan.

Pemantapan pengetahuan sehingga ia menjadi khas, melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan yang tidak lepas dari bagaimana pengetahuan yang ilmiah berelasi dengan pengetahuan awam. Pemantapan itu berlangsung pada level wacana (discourse). Sebagai sebuah episteme, dalam hubungannya dengan pengetahuan ilmiah ia tidak lagi berdiri sebagai suatu cara pandang dalam melihat perbedaan dan pemisahan antara yang benar dari yang salah, melainkan pemisahan dalam ranah praktis antara yang mungkin dari yang tidak mungkin dilakukan atau dipikirkan dengan pendasaran pengetahuan yang ilmiah. Melalui episteme, strategi beoperasinya kekuasaan dalam pengetahuan dapat diketahui. Foucault menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan episteme, yakni mengetahui bagaimana terjadinya perubahan rezim pengetahuan dari suatu masa. Dan tentu saja terjadinya perubahan itu melibatkan beroperasinya kekuasaan.

Secara implisit, Foucault sebenarnya ingin mengatakan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault yang terinspirasi oleh Nietzsche, tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan benar yang final dan bersifat universal. Kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan legitimate belaka, seperti pada kasus Galileo.

Klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik sosial. Itulah kenapa dalam pandangan Foucault kekuasaan itu tidak beroperasi secara negatif melalui aparat yang koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya. Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan efek dari kekuasaan tersebut. Ia tidak bisa dipisahkan dari aparat yang dapat mengendalikan apakah pengetahuan itu otoritatif atau tidak. Distingui antara yang benar dan yang salah juga melibatkan aparat ilmiah yang memproduksi

pengetahuan melalui ritus-ritus kebenaran, yakni melalui dasar empiris sebagai legitimasi bagi kebenaran pengetahuan itu.

Definisi-definisi ilmiah secara jelas juga menunjukkan efek beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana. Definisi psikiatri tentang mental mengubah praktik penanganan orang gila. Definisi kedokteran tentang penyakit, menyebabkan isolasi, pengasingan, dan mengubah hubungan sosial. Konsep tentang kecantikan menghasilkan salon, diet, cara makan, fitness, pakaian, dan kursus-kursus. Agama menghasilkan penyeragaman, baik pakaian, bahasa, perilaku, juga menghasilkan diskriminasi. Pembagian kerja membuat diskriminasi terhadap seksualitas, efisiensi, dan tradisi.

Rezim wacana yang bersandar pada definisi-definisi ilmiah itu menggambarkan disposisi suatu pengetahuan pada masa tertentu yang berimplikasi terhadap praktik sosial. Dengan demikian, setiap masa memiliki watak pengetahuan yang khas dan definisi kebenaran yang khas pula. Foucault menunjukkan terjadinya pergeseran-pergeseran formasi wacana itu dalam penyelidikannya tentang kegilaan, penyakit, kesejahteraan, dan seksualitas yang berimplikasi pada perubahan-perubahan hubungan sosial. Namun, melalui arkeologi, pokok perhatian Foucault bukan dalam rangka menunjukkan terjadinya pergeseran disposisi pengetahuan itu, melainkan bagaimana beroperasinya kekuasaan dalam membentuk suatu disposisi pengetahuan tertentu.

Karya-karya Foucault selanjutnya menunjukkan minat secara lebih besar pada persoalan kekuasaan, bukan sekedar pembentukan sebuah pengetahuan dan kebenaran sebagai episteme. Dalam hal ini Foucault juga memperluas cakupan penelitiannya pada bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, tidak hanya menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, perhatian Foucault selanjutnya adalah menyelidiki bagaimana teknologi kekuasaan berlaku dalam pembentukan kontrol sosial. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan bentuk kekuasaan itu sebagai disciplinary power, dan teknologi kekuasaan beroperasi melalui pendisiplinan tubuh. Metode yang digunakan bukan lagi arkeologi, melainkan genealogy of power.

Analisis genealogi Foucault dimulai dengan penyelidikan mengenai karakteristik relasi kekuasaan (power relations) dalam dunia modern yang bertolak dari pertanyaan

bagaimana beroperasinya kekuasaan dan bagaimana melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Dalam pandangan Foucault, tidak ada model general hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap zaman selalu memiliki karakteristik hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Inilah yang menggugah Foucault mencuplik genealogi sebagai perangkat analisisnya yakni untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan. Berbeda dengan metode analisa yang digunakan oleh Foucault sebelumnya dari beberapa karya awalnya yang menggunakan analisa arkeologi, dalam *Archeology of Knowledge, Madness and Civilization* dan *The Order of Things* yang terbatas pada persoalan struktur wacana dalam pembentukan disposisi pengetahuan, melalui *genealogy of power* ia memluas penyelidikannya pada teknologi kekuasaan.

Dari Arkeologi ke Genealogi pergeseran minat analisa Foucault dari yang semula perhatian penyelidikannya pada bentuk formasi wacana ke penyelidikan terhadap teknologi kekuasaan, berimplikasi pada penggunaan metode, dari arkeologi ide (pengetahuan) ke genealogi kekuasaan. Karya awal Foucault yang mencuplik genealogi dalam analisisnya adalah *Discipline and Punish*. Pada karya itu, Foucault tidak lagi berbicara mengenai wacana, dan relasi diskursif sebagai prioritas kajiannya. Sebaliknya, perhatian utama Foucault terletak pada aspek relasi dan praktik-praktik yang bersifat non-diskursif, yakni pada institusi sosial dan praktik sosial. Bila perhatian utama penyelidikan arkeologi tersasar pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran manusia, maka perhatian pokok penyelidikan genealogi tertuju pada tubuh individu, yang efek-efek teknologi kekuasaan itu dapat diketahui.

Meski demikian, baik *dalam Madness and Civilization maupun The Birth of Clinic, Foucault* sebenarnya telah menunjukkan hubungan historis antara bentuk pengetahuan dan bentuk kekuasaan terhadap tubuh. Akan tetapi dalam analisisnya, Foucault tidak mengartikulasikan konsep hubungan kekuasaan-pengetahuan dan tanpa mengidentifikasi secara eksplisit bahwa tubuh merupakan objek relasi kekuasaan dalam masyarakat modern (Smart 2002:43). Dalam karya selanjutnya, *Discipline and Punish*, konsep relasi kekuasaan-pengetahuan dan tubuh sebagai objek beroperasinya teknologi kekuasaan termaktub secara lebih eksplisit. Dan meskipun dalam karya tersebut Foucault juga berbicara mengenai pergeseran bentuk penghukuman, lahirnya institusi penghukuman modern (penjara), tetapi fokus analisisnya adalah relasi kekuasaan-pengetahuan yang tertanam dalam tubuh, yang menundukkannya, dan menjadikannya sebagai objek pengetahuan.

Pergeseran minat dan tema analisa itu tidak berarti terdapat semacam patahan yang tidak bersambung antara karya awal dengan karya belakangan. Smart (2002) menyebutnya sebagai re-ordering, yakni penyusunan prioritas analisa dari yang begitu dipengaruhi oleh pemikiran strukturalis dengan tema utamanya adalah pada wacana, menjadi lebih memprioritaskan pada analisa terhadap institusi sosial, praktik sosial, teknologi kekuasaan dan teknologi diri (technology of the self), dan seluruh kompleksitas interelasi bentuk pengetahuan dalam hubungannya dengan praktik non-diskursif dan praktik diskursif, yakni pengetahuan dan kekuasaan, serta insitusi sosial sebagai media beroperasinya mekanisme kekuasaan dan bentuk pengetahuan yang mengkonsolidasikannya.

Soverign Power, Disciplinary Power, dan Governmentality dalam sosiologi, konsepsi tentang tubuh seringkali absen menjadi bagian dalam analisisnya. Kalaupun ada, tidak lebih tubuh dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai tubuh yang natural yang tidak memiliki asal usul sejarah dan kebudayaan pembentukannya (lihat Smart 2002). Pada konteks pemikiran Foucault, konsepsi tentang tubuh merupakan bagian yang sentral dalam beroperasinya relasi kekuasaan. Analisis genealogi memunculkan tubuh yang dipandang sebagai objek pengetahuan dan target beroperasinya kekuasaan. Konsepsi tentang tubuh diletakkan pada ranah politik, tertanam dalam relasi kekuasaan yang membuatnya menjadi patuh dan produktif serta berguna secara politik-ekonomi.

Kekuasaan yang beroperasi terhadap tubuh individu merupakan gambaran dari bentuk disciplinary power. Disciplinary power adalah teknologi kekuasaan yang dijalankan untuk mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna. Kekuasaan model ini menurut Foucault dapat berlangsung efektif dalam institusi yang tertutup seperti penjara, rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, dan pada institusi pendidikan atau sekolah. Kekuasaan model ini pada intinya berusaha menciptakan situasi di mana tubuh individu dapat menginternalisasikan penundukan dan menjadikannya seolah sebagai suatu keadaan yang normal. Inilah yang disebut Foucault sebagai praktik normalisasi dari berlangsungnya kekuasaan terhadap tubuh individu. Konsep disciplinary power digunakan untuk menunjuk suatu bentuk kekuasaan dan wujud teknologi atau mekanisme beroperasinya kekuasaan itu. Konsep itu lahir sebagai hasil analisa genealogi kekuasaan Foucault terhadap operasi kekuasaan dalam masyarakat Eropa sejak abad tujuh belasan hingga abad modern.

Pada konteks negara, disciplinary power berlangsung dalam institusi-institusi tertutup sebagai mekanisme pengendalian individu agar dapat memberikan kegunaan bagi kepentingan negara atau pemerintah. Model kekuasaan ini sudah dapat ditemui dalam masyarakat Eropa sekitar abad 18an. Akan tetapi, dalam hal ini negara tidak hanya menjalankan model kekuasaan disciplinary power, tetapi juga sebagaimana konsepsi Weber tentang kekuasaan, negara menjalankan kekuasaan menggunakan model sovereign power, yang melandaskan legitimasi operasinya pada keabsahan hukum dan kewenangan atau hak negara dalam mengatur warganya dan sumber dayanya. Tidak seperti disciplinary power di mana kekuasaan dijalankan melalui cara-cara yang seringkali tidak diketahui subjeknya, sovereign power justru dijalankan oleh negara melalui cara-cara yang negatif. Represi dan dominasi menjadi bagian dari proses pengendalian warga negara oleh negara. Cara-cara yang negatif itu dijalankan karena negara dipandang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan itu.

Relasi Dominasi dan Relasi Kekuasaan Ada perbedaan yang cukup mencolok atas pandangan mengenai kekuasaan terutama dari pandangan yang masih belum bisa melepaskan pengaruh perspektif Marxian atau Weberian tentang kekuasaan dengan pandangan Foucauldian. Beberapa akademisi yang mencoba memahami pandangan Foucault tentang kekuasaan pun rupanya tidak terlalu berhasil melepaskan diri dari kerangkeng pengaruh perspektif kekuasaan negatif Marxian. Tania Li (1999a, 1999b, 2007), misalnya, memandang governmentality sebagai sejenis dengan hegemoni (teknologi untuk mengontrol populasi tanpa menggunakan kekerasan dan dominasi tetapi dengan memanipulasi konsensus) namun minus potensi resistensi atau anti- kekuasaan. Kita juga dapat melihat pada tulisan Amity Doolittle yang menggunakan konsep governmentality dalam menjelaskan relasi negara-masyarakat lokal dalam perebutan hak atas tanah sebagai cara negara mengontrol populasi dengan menciptakan mekanisme normalisasi dan pendisipinan, yang tentu saja bias dan tumpang tindih dengan konsep disciplinary power. Tulisan Peluso dan Watts (2001) dalam *Violent Environments* juga menunjukkan kecenderungan yang sama; memandang governmentality sebagai konsep relasi kekuasaan dalam medan pertarungan negara vis a vis masyarakat. Selanjutnya pengertian yang sama dapat kita lihat pada tulisan Paul Robbins dalam *Political Ecology* yang juga merujuk. Bryant dalam memahami governmentality sebagai internalisasi cara-cara koersif yang

dijalankan negara terhadap populasi dengan menciptakan self-enforcing coercion melalui pengendalian consent (lihat Robins 2004).

Penulis- penulis di atas memberikan pengertian yang kurang lebih sama atas konsep governmentality sebagai penundukan yang dilakukan secara hegemonik sebagai mekanisme normalisasi relasi dominasi. Ini merupakan bentuk pemahaman yang tumpang tindih antara konsep disciplinary power dengan konsep governmentality. Untuk menjawab tantangan konseptual ini, kita dapat melihat pada karya Foucault *Discipline and Punish* (1975) yang menekankan pada penyelidikan mengenai rasionalisasi politik yang dijalankan negara dan tentang genealogi negara (genealogy of the state) (1995:139-141) (lihat Lemke 2000). Di sisi lain, kita dapat melihat karya Foucault *History of Sexuality Vol 1* (1978) yang menekankan pada penyelidikan mengenai genealogi subjek (genealogy of the subject). Pada karya yang pertama, Foucault berkepentingan menyelidiki bagaimana praktik kekuasaan yang dijalankan oleh negara menggunakan aparatus disiplin, sementara pada karya selanjutnya Foucault berkepentingan menyelidiki bagaimana pembentukan subjek dalam relasi kekuasaan. Yang pertama adalah usaha untuk menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan, sementara yang belakangan menunjukkan bagaimana proses subjektifikasi terhadap individu dalam relasi sosial. Menurut Lemke (2001), missing link di antara dua penyelidikan itu terletak problem government. Konsep governmentality digunakan oleh Foucault untuk menganalisa hubungan antara apa yang dia sebut sebagai teknologi diri (technology of the self) dengan teknologi dominasi memahami everyday form of resistance melainkan model symbolic violence Bourdieu dan hegemony Gramsci. (technology of domination), dan pembentukan subjek (constitution of the subject) dengan formasi negara (formation of the state).

Pandangan di atas dapat membantu menjelaskan perbedaan antara relasi kekuasaan dengan relasi dominasi. Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Sebaliknya, governmentality merupakan bentuk kontrol atau pengendalian diri (self-government) yang membentuk dan menghasilkan ranah kemungkinan pilihan tindakan subjek. Konsep kekuasaan ini tidak mengeksklusi bentuk konsensual (hegemoni) atau pilihan penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan dan model konsensual telah direformulasi menjadi elemen dalam pengendalian antarsubjek dalam relasi sosial. Metode-metode koersi dan konsensus itu merupakan elemen atau instrumen daripada fondasi atau

sumber relasi kekuasaan (Foucault 1982b: 219-222). Menurut Lemke (2000:4) *governmentality* merupakan konsep kekuasaan yang digunakan oleh Foucault untuk mempelajari kapasitas otonom individu melakukan kontrol diri dan bagaimana hal itu berkaitan dengan politik dan eksploitasi ekonomi negara. *Governmentality* adalah konsep kekuasaan yang digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara teknologi diri (*power from below*) dengan teknologi dominasi (*power from above*).

Relasi dominasi mengandaikan bahwa relasi antarsubjek tidak berlangsung secara sejajar atau seimbang. Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan (Foucault 1982a). Relasi dominasi adalah bentuk dari relasi kekuasaan yang stabil, hierarkis, mantap, dan sulit untuk dipertahankan.

Perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi dapat pula diketahui dengan melihat bahwa ada model relasi kekuasaan lainnya, yakni relasi kekuasaan sebagai *strategic games between liberties*. Beroperasinya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi, tetapi ia tidak berarti bahwa kekuasaan ini dijalankan bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari relasi kekuasaan itu; dan pada konteks ini juga tidak signifikan untuk mengatakan bahwa menentukan tindakan orang lain (*to determine the conduct of other*) adalah buruk. Relasi kekuasaan yang dijalankan dalam model ini dapat kita amati pada upaya-upaya melalui apa yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*) atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu agar dapat menjadi subjek yang bebas dalam mengambil keputusan dalam berbagai ranah tindakan (Foucault 1982a).

Model relasi kekuasaan lainnya adalah *governmentality*. Model ini berada di antara *strategic games* dan dominasi. *Governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct of conduct*, suatu relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang mengarahkan tindakan orang lain atau cara bagaimana orang lain berperilaku dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan yang sangat terbuka (Foucault 1982b). Menjalankan relasi kekuasaan dalam model ini juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi ranah pilihan tindakan dari yang lain. Dengan demikian, ada tiga level analisa kekuasaan, yakni yang dipahami sebagai relasi strategi, *governmentality*, dan dominasi yang biasanya disebut sebagai kekuasaan.

Sementara itu, Li dan beberapa penulis yang disebut di atas menyamakan governmentality dengan hegemoni atau dominasi yang dinormalisasikan melalui consent, bukan sebagai teknik dalam relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan itu terdapat dalam setiap relasi sosial, karena itu kekuasaan tidak memusat dan tidak pula termiliki, tetapi ia tersebar: bukan karena merengkuh segalanya tetapi karena ia berasal dari manapun. Relasi dominasi mengandaikan bahwa subjek subordinat memiliki pilihan tindakan yang sangat terbatas, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan. Sedangkan relasi kekuasaan memberikan banyak kemungkinan pilihan tindakan. Conduct of conduct bukan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara (lihat Foucault 1982:138- 141).

Pemilihan tindakan itu bukan karena paksaan atau ketidaksadaran alam pikiran yang diarahkan oleh hegemoni dan manipulasi ideologi, melainkan secara potensial seorang individu menentukan pilihan tindakan yang sesungguhnya dikehendaki oleh negara. Dengan demikian, governmentality sesungguhnya adalah gambaran tentang mekanisme kekuasaan yang dapat mewujudkan dalam setiap relasi sosial, bukan sekedar relasi negara dengan masyarakat seperti dalam pandangan Marx atau Gramsci. Hanya saja, memang relasi kekuasaan yang tampaknya hanya berurusan dengan relasi antar subjek ternyata semakin dipengaruhi oleh negara. Maka relasi kekuasaan yang berlangsung dalam setiap relasi sosial sesungguhnya inheren di dalamnya pengaruh kepentingan- kepentingan negara. Menurut Foucault, relasi kekuasaan kini sudah semakin dipengaruhi dan terus-menerus berada di bawah kontrol negara. Inilah mengapa kemudian Foucault (1982: 141-142) menyebut model relasi kekuasaan itu dengan governmentality karena memang relasi kekuasaan semakin digovernmentalisasi (governmentalized):

Secara sederhana perbedaan antara relasi dominasi dan relasi kekuasaan dapat kita lihat pada tabel berikut.

C. Relasi dan Kuasa Negara dalam Konstruksi Berita

Media merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat, yang terletak diantara dua pihak sebagai perantara atau penghubung. Media massa meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak terbagi beberapa macam diantaranya koran,

majalah, buku dan sebagainya, selanjutnya media elektronik terbagi menjadi dua macam yaitu radio dan televisi, sedangkan media online meliputi media internet seperti website, media sosial, dan lainnya (Syarifuddin Yunus, 2010).

Jika dilihat dari kemampuan dalam menarik perhatian masyarakat ketiga jenis media massa sama-sama memiliki strategi dalam menarik perhatian. Namun, media sosial yang merupakan bagian dari media online bisa saja lebih aktif dalam mengalihkan perhatian masyarakat (Dan Zarrella, 2010).

Menurut McQuail, 2000; terdapat 6 (enam) perspektif dalam melihat peran media massa dalam kehidupan sosial terutama dalam masyarakat modern, antara lain:

1. Melihat media massa sebagai *window on event and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang terjadi diluar sana, atau media sebagai sarana informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa.
2. Media sering dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implaying a faithful reflection*. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya, karenanya para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lainnya.
3. Memandang media sebagai filter, atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Televisi senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelolanya.
4. Media massa sering dipandang sebagai *guide*, penunjuk jalan atau *interpreter*, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam.
5. Melihat media massa sebagai forum untuk mempersentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik.
6. Media massa sebagai *interlocutor*, yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga *partner* komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. (Husnul Khatimah, 2018).

Menurut Hafied Cangara Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan

menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Cangara, 2010). Jenis-jenis media massa pun antara lain, media massaelektronik seperti televisi, radio dan film, lalu media massa cetak seperti koran, tabloid maupun majalah, dan media *online* juga yaitu media massa yang bisa didapatkan di internet, selain itu media sosial juga termasuk menjadi solusi dan informasi dari permasalahan yang ada di dunia.

D. Relasi Negara dan Ulama di Indonesia

Ulama Aceh telah berhasil membangkitkan semangat umat Islam dalam mengusir penjajah di Nusantara, namun implikasi semangat tersebut belum terlihat dalam praktek komunikasi sosial-keagamaan pada masa Pandemi Covid-19 di Aceh. Dalam konteks Aceh, gerakan ulama dipandang signifikan karena ulama berkedudukan sebagai pewaris Nabi. Selanjutnya ulama tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan bangsa Aceh yang mayoritas muslim. Argumen lain yang dianggap penting adalah ulama menjadi rujukan dalam berbagai persoalan sosial di kalangan masyarakat Aceh. Sejak Islam sampai ke Aceh, ulama telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan rakyat. Dalam hal ini, sejumlah ahli memandang bahwa faktor jaringan ulama telah memberikan warna intelektual di Aceh. Kehadiran mereka saat itu juga sangat diharapkan oleh masyarakat guna mengajar mereka ajaran-ajaran Islam. Secara ideal konseptual maupun historis sosiologis, peran ulama dalam kehidupan umat Islam sangat signifikan.

Ulama secara etimologi adalah bentuk plural dari kata ‘Ālim yang artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu.² Sedangkan secara terminologi penulis belum menemukan definisi ulama yang Jāmi’ (mencakup semua unsur-unsur yang menjadi bagiannya) dan māni’ (mengeluarkan semua unsur-unsur yang bukan menjadi bagiannya). Akan tetapi di sini penulis akan menyebutkan pandangan ulama terkait tentang istilah ulama. al-Jurjānī menyebutkan dalam kitabnya at-Ta’rīfāt bahwa al-‘Ālim secara bahasa adalah “Sebuah ungkapan bagi orang yang mengetahui sesuatu, karena orang tersebut mengetahui Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa ulama ialah orang yang memiliki kualitas ilmu yang mendalam. Disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa ulama adalah ahli pengetahuan dalam agama Islam; orang pandai-pandai dalam hal agama Islam. Sedangkan Ulama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah para ulama yang bertugas di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera utara.

Keberadaan ulama telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-fathir ayat 28, Allah berfirman yang artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Ayat di atas sebagai penguat terhadap Hadits yang berbunyi al-'Ulama Waratsatil Anbiya' (ulama adalah pewaris para nabi). Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan bahwa, "hanya ulamalah yang 'arif billah yang benar-benar takut kepada Allah Swt, karena sesungguhnya ketika ma'rifat (mengerti) pada Zat Yang Maha Agung itu semakin sempurna dan pengetahuan tentang-Nya juga semakin sempurna, maka khasya (rasa takut) kepada-Nya.

Secara historis sosiologis, ulama memiliki otoritas dalam bidang keagamaan sehingga menempati kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat Muslim. Masalah posisi dan peranan ulama semakin kompleks bila dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ulama peranan dalam berbagai bentuk gerakan, seperti, politik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan tentu saja yang terpenting, keagamaan.

Di Aceh, strategi menjadikan ulama sebagai media komunikasi publik memang telah pernah menunjukkan keberhasilannya di masa lalu dengan jangkauan penyampaian pesan yang lebih luas keberbagai pelosok dan jenjang strata sosial. Penyelenggaraan ulama sebagaimana dimaksudkan diatas akan menjadi perhatian para pemerhati sosial karena apasaja yang dipraktekkan di Aceh akan selalu berhadapan dengan sistim nilai ulamasebagai barometer yang digunakan untuk mengukur boleh atau idak suatu kegiatan dilakukan.

Ulama turut mengambil peran dalam dakwah Islam secara luas dalam artian geografis maupun koridor kegiatan. Secara geografis jaringan ulama menyebar secara cepat mulai dari Hijaz, Perisia, Hindustan dan juga dunia Melayu. Mereka cerdas dalam melihat *setting* sosial yang sedang terjadi di panggung sosial suatu masyarakat, sehingga mampu merancang suatu instrumen yang adatif dalam mengkomunikasikan ajaran Islam. Mereka menjadikan budaya lokal sebagai media dakwah dengan memberikan muatan nilai-nilai

Islam dalam budaya tersebut, seperti memberi muatan Islam dalam pertunjukan ulama seudati di Aceh ataupun ulama.

Dengan terus mendorong terbangunnya budaya yang mengandung norma-norma yang Islami dalam masyarakat, maka nilai tersebut secara latin akan bekerja membatasi, mendesak atau memaksa kelakuan anggota- anggota masyarakat, membentuk, mengorganisasi dan memimpin untuk mencapai nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Karena itu, pengendalian sosial merupakan suatu proses dan sistim yang bersifat mendidik, mengajak ataupun memaksa anggota-anggota masyarakat agar mau mentaati norma- norma dalam suatu masyarakatnya. Untuk itu instrumen yang digunakan perlu harus steril dari unsur yang bertentangan dengan ulamaitu sendiri.

Ulama merespon fenomena covid-19 melalui media komunikasi sosial-keagamaan. Sebagai penerus para nabi, ulama terus melakukan penjagaan terhadap aqidah umat dari berbagai gangguan termasuk kecemasan masyarakat terhadap wabah corona melalui siraman ruhani dan memperbaiki kualitas hidup secara Islami. Ulama bahkan menjadi identitas dari suatu suku bangsa. Hal tersebut dikarenakan ulama menjadi ikon nilai- nilai yang belaku di kalangan sukubangsa tersebut. Karena itu, dengan menelusuri cara ulama merespon fenomena ovi-19, maka akan mdiperoleh gambaran dan pemahaman tentang praktek komunikasi sosial-keagamaan sebagai respon ulama terhadap pandemi covid-19 di banda aceh.

Ulama di Aceh menjadi penting karena merupakan individu untuk membangun komunikasi antar berbagai pihak demi terbangunnya suatu kesadaran tentang suatu fenomena yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Islam benkembang pesat di Aceh, dimana Islam telah mewarnai sistim budaya dan sistim nilai, sehingga berbagai kebudayaan dan sistim nilai termasuk tarian telah merujuk kepada nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, ulama unsur lebih dominan berperan dalam mengayomi masyarakat.

Ulama Aceh dapat dikatakan terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakatnya dalam segala bidang. Dalam keulamaan Aceh kita temukan unsur-unsur agama, dalam siasat pemerintahan, dalam siasat peperangan, dalam keulamaan sastra, dalam bidang pergaulan dan adat istiadat, dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dalam bidang amal usaha dan perbuatan, apalagi dalam bidang keyakinan dan sosial- kemasyarakatan.

Paparan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa di kalangan masyarakat Aceh terdapat hubungan timbalbalik yang erat antara peran ulama dengan dengan kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari unsur ulama menentukan hampir dalam seluruh aspek, demikian juga dengan unsur ulama ditemukan dalam praktek Syari`ah. Hubungan ulama dan masyarakat Aceh dapat dikatakan unik karena memang nilai-nilai ulama menjadi landasan seluruh masyarakat Aceh.

Ulama dapat memainkan peran strategis sebagai unsur dalam menjaga identitas suatu komunitas baik sebagai etnis maupun bangsa dengan cara tetap menjaga proses tranformasi nilai ke generasi selanjutnya. Karena itu budaya sebagai pengendalian sosial dapat bersifat preventif dan dapat pula bersifat represif. Pengendalian sosial yang bersifat preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan pengendalian sosial yang bersifat represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian dari norma-norma yang telah terganggu yang diakibatkan pergeseran nilai.

Ulama juga bekerjasama dengan penguasa Aceh dan para penyebar Islam di masa lalu untuk menyampaikan pesan-pesan yang penting ketengah-tengah masyarakat. Ulama mempunyai daya tarik bagi sebahagian masyarakat Aceh karena pada mereka terdapat nilai sosial- keagamaan yang padat yang tidal lain adalah elemen dari sistim nilai masyarakat Aceh itu sendiri.

Lembaga keagamaan resmi di Aceh yang bertanggungjawab memberikan fatwa dan tausiyah terkait permasalahan sosial keagamaan di Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Dijelaskan di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) bahwa keanggotaan MPU terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim yang mampu memahami agama dari sumber aslinya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Sedangkan wewenang MPU dijelaskan oleh Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 adalah; (1) menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan kemasyarakatan. (2) memberi arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya (Adan, 2019).

Membaca kandungan UUPA dan Qanun Aceh tentang legalitas dan wewenang MPU, maka tergambarlah dibenak penulis bahwa seluruh kondisi sosial di Aceh tidak

boleh luput dari perhatian MPU. Termasuk yang mendesak saat ini yaitu merebaknya pandemi covid 19.

Sebenarnya terkait penanganan covid 19 MPU Aceh sudah mengeluarkan beberapa fatwa dan tausyiah semenjak pandemi tersebut melanda Aceh. Fatwa dan tausyiah tersebut bila diurutkan berdasarkan nomor dan tahun penerbitannya adalah sebagai berikut:

1. Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam
2. Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tajhiz Mayat Covid Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh
3. Taushiyah MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penangkalan dan Pencegahan Wabah Penyakit
4. Tausyiah MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pasien Wabah Penyakit.
5. Tausyiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya Dalam Kondisi Darurat
6. Tausyiah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1441 H
7. Tausyiah MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1441 H
8. Taushiyah Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dengan Vaksin Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China Dan Pt Biofarma (Persero)
9. Taushiyah Mpu Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan Dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1442 H

Fatwa-fatwa dan tausyiah tersebut disosialisasikan melalui media massa baik media cetak maupun media online. Paska penerbitan fatwa biasanya langsung diadakan konferensi pers. Fatwa itu juga dapat diperoleh dari web resmi MPU Aceh.

Banyaknya fatwa dan tausyiah yang diproduksi MPU Aceh tersebut menunjukkan respon yang progresif otoritas keagamaan yang resmi di Aceh terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Pertanyaannya apakah fatwa dan tausyiah itu diketahui masyarakat secara merata? Dari wawancara penulis dengan beberapa orang masyarakat kota Subulussalam kebanyakan tidak mengetahuinya. Menurut penulis penyebabnya adalah fatwa dan taushiyah itu tidak disosialisasikan secara intens di media sosial. Di samping itu masyarakat juga tidak ada keinginan untuk mengetahui hal tersebut. Sebenarnya tugas mensosialisasikan fatwa dan tausyiah MPU Aceh itu adalah MPU Kota ke seluruh lapisan masyarakat. Tetapi sayang hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan sempurna dengan alasan anggaran yang terbatas.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menjelaskan relasi kuasa negara, ulama dan media secara deskriptif dan mendalam. Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif, seperti kata-kata yang tertulis atau berupa kata-kata verbal dari orang yang diamati. Sementara, penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller adalah sebuah penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial dengan tradisi tertentu yang selalu berurusan dengan orang-orang yang diamati. (Syukur Kholil, 2006) Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial yang dilakukan dengan cara pengumpulan data secara spesifik dan mendalam. (Rachmat Kriyantono, 2008) Penelitian kualitatif prosesnya dilakukan secara alamiah karena tidak adanya intervensi apapun dari peneliti. Penelitian kualitatif berjalan apa adanya sesuai dengan fenomena yang ada. (Creswell, 2014)

Ada tiga metode dalam membahas isi media dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis wacana (discourse analysis), analisis semiotic (semiotic analysis), dan analisis framing (framing analysis). Semuanya berpijak pada asumsi bahwa sebenarnya isi media dipengaruhi oleh berbagai komponen yang terdapat dalam institusi media itu sendiri. (Sobur, 2001). Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode analisis wacana dengan pendekatan kualitatif. Bahasa dalam Testimonial Ulama Dayah Aceh terkait Vaksinasi akan dikaji menggunakan analisis Wacana Foucault. Menurut Fairclough, pemakaian bahasa baik lisan maupun tulisan memungkinkan untuk menampilkan efek ideologis, memproduksi dan mereproduksi relevansi kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki, perempuan, kelompok mayoritas maupun minoritas. Intinya adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Bahasa adalah bentuk material dari ideologi, dan bahasa diinvestasikan oleh ideologi. (Fairclough, 2010).

Van Dijk juga menyatakan bahwa jenis penelitian analisis wacana yang menitikberatkan kepada kajian bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dibuat, diproduksi, dan ditolak melalui teks atau lisan di dalam konteks sosial dan politik. (Dijk, 1987). Analisis wacana ini digunakan untuk menngungkap fakta dibalik realita media Serambi Indonesia terkait pemberitaan vaksinasi dan ulama dayah Aceh.

B. Sumber Data

Sumber data utama penelitian ini adalah testimonial Ulama dayah Aceh dalam bentuk narasi yang dipublikasikan melalui media massa baik online maupun cetak serta Baliho dan Spanduk yang dipasang diberbagai kota di Aceh. Narasi testimonial tersebut juga akan ditriangulasi dengan hasil wawancara mendalam para ulama dayah Aceh, yaitu Waled Nuruzzahri, Abu Abdul Mannan, Abu H Asnawi Abdullah, Abu Muhibbutibry, dan beberapa ulama lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini dialkukan dengan tahapan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik Purpossiv sumpling, yaitu sampel bertujuan dengan kriteriua yang telah ditentukan. Adapaun narasumber yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Waled Nuruzzahri, Abu Abdul Mannan, Abu H Asnawi Abdullah, Abu Doktor Muhibbutabhari dan Abi Daud Hasbi. Narasumber ini merupakan para Ulama Aceh, MPU sekaligus pimpinan Dayah. Selain itu, Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia Zainal Abidin, Kepala biro Serambi Indonesia Bireun Yusmaddin dan 5 Masyarakat Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu para ulama dayah Aceh, wartawan dan Pemred Serambi Indonesia dan Masyarakat. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui unit analis konstruksi berita vaksinasi covid 19 di Serambi Indonesia dan Baliho yang dipasang diberbagai pusat kota.

E. Analisis Data

Analisis adalah proses memilah dan memilih data-data yang sudah ada dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Alasannya, karena teknik ini akan menganalisis bukan hanya data (pesan yang terlihat) saja (*manifest*), namun juga berusaha menemukan fakta dari yang tidak terlihat (*laten message*). Teknik analisis isi kualitatif ini peneliti gunakan bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis keseluruhan isi pesan yang terkandung dalam narasi testimoni ulama dayah Aceh terhadap vaksinasi covid 19.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Relasi Kuasa Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh

Mengkaji narasi testimonial ulama dayah terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh tidak bisa dilepaskan dari relasinya dengan media, negara. Secara historis, Ulama di Aceh selain sebagai guru ngaji dan juru dakwah, ia memberikan gagasan dan seruan-seruan dalam tindakan demi kemajuan dan perubahan yang maksimal pada dimensi ideologis dan praksis dalam kemasyarakatan dan pemerintahan (kekuasaan). Sebagai agen atau aktor sosial, kedekatan ulama di Aceh dengan masyarakat sangat kental. Posisinya yang sentral dapat memberikan pengaruh pada tingkat sosio-politik berupa kebijakan dari pemerintahan (kerajaan) atau kendali tindakan dari kemasyarakatan. (Chabibi, 2016).

Aceh merupakan daerah yang religious, disamping karena digelar sebagai Serambi Mekkah, juga negeri ini sudah memproklamirkan pelaksanaan Syari'at Islam secara formil. Posisi ulama di kawasan ini sangat strategis. Sejak awal berdiri dan berkembangnya Negeri Aceh Darussalam, telah sangat nyata keseriusan para penguasa dalam menjaga syari'at Islam. Pada masa tertentu, ulama menjadi warashatul anbiya' di mana ulama tidak hanya dijadikan penasehat oleh kepada negeri, tetapi juga dijadikan sebagai guru dalam kalangan masyarakat. Ketika periode kesultanan Aceh, ulama memiliki peran yang sangat mulia dan strategis. Karena waktu itu para ulama menjadi para penasehat sultan. Sejarah mencatat tidak kurang dari dua puluh ulama pernah menjadi penasehat para Sultan Aceh, dalam berbagai masanya. Para ulama tersebut antara lain: Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniry, Sayfarrijal, Syaikh Abdurrauf As-Singkili, Jalaluddin al-Tursani, Syaikh Muhammad Zain, Syeikh Abdullah al-Asyi, Syeikh Jamaluddin bin Abdullah al-Asyi, Syeikh Muhammad bin Ahmad Khatib, Syeikh Abbas al-Asyi, Syaikh Daud bin Ismail dll. (Abdul Wahid, 2013)

Keterpengaruhan ulama dalam sosial masyarakat, oleh pengamat kebijakan publik Nasrul Zaman mengatakan Pemerintah perlu mengoptimalkan keterlibatan aktif para ulama, ustaz, pimpinan dayah, dan imam masjid dalam meningkatkan

cakupan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di Aceh. Pendekatan ini lebih efektif dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat Aceh, dibandingkan dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI. Beberapa temuan penelitian terkait relasi kuasa ulama, media dan negara dalam Vaksinasi masyarakat Aceh dapat dijelaskan bahwa dalam teori politik, keseluruhan peran ulama secara politik dalam relasinya dengan negara dikenal dengan istilah *descending of power* yang merupakan sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai agama.

1. Relasi Ulama dengan Negara

Rubaidi mengatakan dalam sistem ini, ulama berfungsi memberi fatwa terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, para ulama juga berfungsi sebagai “lembaga arbitrase” dalam suatu konflik. Dalam proses Islamisasi terjadi interaksi simbiosis antara ulama dan kelompok politik saling membutuhkan. Ulama membutuhkan elit politik untuk kepentingan dakwah. Sebaliknya, elit politik (pemerintah) membutuhkan ulama untuk legitimasi kekuasaan. Sistem politik *descending of power* dicirikan dengan pemisahan antara agama dan negara (umur al-Dunya-umur al-Din). Agama diletakkan sebagai ruh kehidupan. Sebaliknya, agama tidak dilegal-formalkan secara hitam putih sebagai hukum (positif) negara dalam wujud syariat Islam. (Rubaidi, 2021).

Sementara dalam hal vaksinasi covid 19 di Aceh, ulama berperan sebagai pendukung pemerintah. Sebagaimana Abi Daud Hasbi pimpinan Dayah Inshafuddin banda Aceh mengatakan bahwa, program pemerintah harus didukung oleh ulama. Pemerintah tentu sudah melalui berbagai usaha untuk mengeluarkan sebuah kebijakan maupun program. Intinya, musyawarah dengan berbagai elemen termasuk ulama, guna untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Terkait vaksinasi, MPU Aceh mendukung dan kami para pimpinan dayah juga sepakat jika vaksinasi dilakuakn sebagai ikhtiar memutus rantai penyebaran virus corona. (Wawancara dengan Abi daud Hasbi).

Senada dengan Abi Daud Hasbi, Abu Mannan, MPU Aceh Utara juga berpendapat bahwa, vaksinasi ini hanya sebagai ikhtiyar saja, namun Allah yang menentukan semuanya. Pemerintah mengajak kita untuk melakukan vaksin sebagai usaha agar virus corona tidak berkembang di Aceh ini. Tentu Usaha ini harus dibarengi dengan doa. Pemerintah membutuhkan ulama, karena Ulama merupakan

salah satu panutan masyarakat Aceh. Insya Allah masyarakat Aceh untuk saat ini masih mendengarkan petuah ulama. (Wawancara dengan Abu Mannan)

Abu Doktor Muhibbuthabary wakil ketua MPU Aceh juga mengatakan bahwa, anjuran vaksinasi oleh pemerintah Aceh dan Indonesia merupakan salah satu usaha yang dilakukan negara untuk mengatasi virus corona bertambah banyak memakan korban di Aceh. Usaha ini didukung oleh Ulama sebagai salah satu upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Vaksinasi covid 19. (Wawancara dengan Abu Doktor Muhibbuthabary).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat pro kontra terkait dengan hukum vaksinasi covid 19 bagi masyarakat Aceh. Penolakan untuk melakukan Vaksin disebabkan oleh fatwa ulama atas halal dan haramnya Vaksin. Fatwa ulama ini menjadi pijakan dan pengaruh terhadap kesadaran vaksin masyarakat Aceh.



Menanggapi peneolakan vaksinasi oleh Masyarakat Aceh. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali mengajak semua masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan Covid-19. Begitu juga dengan pemerintah dan petugas kesehatan, agar tidak bosan-bosan mengedukasi dan menyosialisasikan tentang pentingnya vaksinasi dengan bahasa-bahasa yang lembut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, bagi sebagian masyarakat Aceh, Agama dan negara memiliki kaitan dalam pengambilan kebijakan. Terkait dengan Vaksinasi, masyarakat Aceh sangat memperhatikan halal dan haramnya. Halal dan haram merupakan wilayah agama yang membutuhkan otoritas negara dalam kebijakannya.

2. Ulama: *Power of knowledge*

Sebagai pendidik atau penganjur agama, ulama di Aceh mendapatkan pengakuan yang bersifat lokal dari masyarakatnya sebagai orang Muslim yang berpengetahuan luas mengenai ilmu keislaman dan akhlak sehingga diyakini tidak ada anggota masyarakat yang sepadan dengan keilmuan dan wibawa ulama. Keyakinan tersebut berlanjut kepada sikap memposisikan ulama (teungku dayah) sebagai pemegang otoritas keilmuan Islam seperti al-Quran, hadist dan fikih. Keyakinan masyarakat Aceh terhadap ulama sebagai pemegang otoritas agama menciptakan satu kohesi sosial yang kuat setelah masyarakat memberikan rekognisi sosial atau pengakuan keulamaan dari komunitas masyarakatnya. Dengan demikian segala justifikasi norma agama yang keluar dari ulama Aceh menjadi sebuah ketergantungan mendalam bagi masyarakatnya. Termasuk apa yang berkaitan dengan tindakan-tindakan individu dari masyarakat berkenaan dengan sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. (Chabibi, 2016).

Dalam hal ini masyarakat membutuhkan ketegasan ulama dalam halal dan haramnya vaksin. Ketegasan ini yang akan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan vaksin. Abi Daud Hasbi mengatakan bahwa ulama dijadikan sebagai public figur dalam vaksinasi covid, karena ulama memiliki pengetahuan kuat terkait fatwa halal dan haram. Bagi masyarakat Aceh yang masih kental dengan semangat

keislamannya, fatwa halal dan haram menjadi tolak ukur Vaksin itu dapat digunakan. (Wawancara dengan Abi Daud Hasbi)

Menurut Azra pengakuan ulama oleh masyarakatnya bukan karena ia dapat menguasai pemahaman tentang agama, akan tetapi ada faktor sosio-religius yang membuat pertimbangan-pertimbangan terkait dengan integritas moral dan akhlaknya yang dilengkapi dengan unsur kedekatan ulama kepada umatnya.(Azra, 2002). Kedekatan ulama dengan masyarakat dijadikan oleh pemerintah sebagai media untuk mempengaruhi masyarakat dalam hal vaksin covid 19.

3. Simbiosis Interaksionis

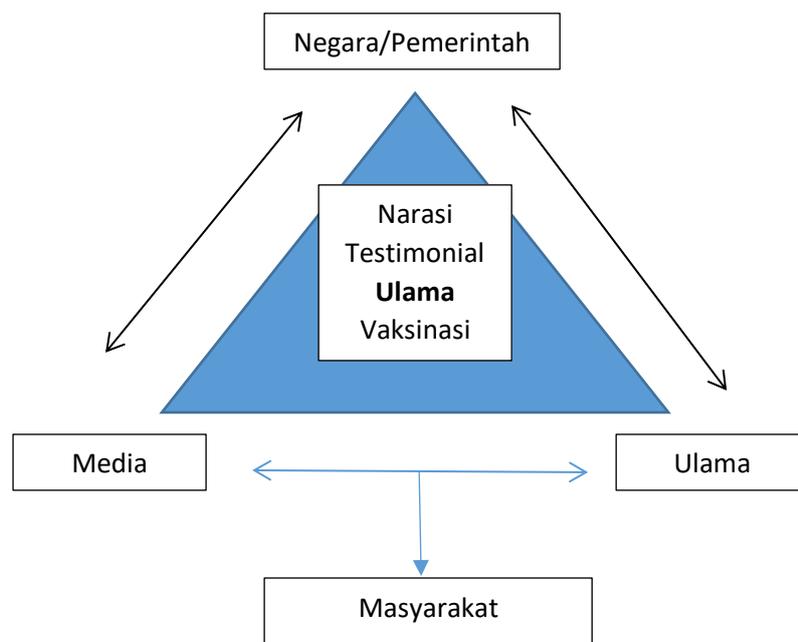
Abu manan, ketua MPU Aceh Utara mengatakan, mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi adalah sebagai bentuk ikhtiyar. Selain itu, vaksinasi ini adalah program pemerintah, jadi harus diikuti. Tapi dengan harapan, pemerintah juga harus ikut mendukung program keagamaan untuk membentuk dan memperkuat keimanan masyarakat Aceh menuju masyarakat yang bertaqwa. Jangan sampai, selalu masyarakat yang harus mendukung pemerintah dalam hal vaksinasi, tapi untuk agama misalnya memebantas maksiat, narkoba dll, pemerintah juga harus bersinergi dengan ulama. (Wawancara dengan Abu Manan).

Abu Manan dalam hal ini menekankan adanya simbiosis mutualisme, saling bersinergi dan saling menguntungkan antara pemrintah dengan masyarakat dan ulama. Pemerintah berhasil menjalankan programnya untuk vaksinasi, sementara ulama dan masyarakat juga menginginkan ketentraman dan kedamaian tanpa ada maksiat dan narkoba.

Abi Daud Hasbi juga mengatakan bahwa ulama dan pemerintah harus bersinergi untuk mengedukasi masyarakat melakukan vaksinasi. Tujuan dari sinergi ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Aceh. Pandemi covid 19 memang memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Sehingga upaya untuk menanggulangnya harus dilakukan secara bersama-sama antar pemerintah dengan ulama. Diksi yang digunakan oleh ulama dalam menyampaikan pesan vaksinasi mampu menstimulus masyarakat untuk melakukan vaksin. (Wawancara dengan Abi Daud Hasbi).

4. Relasi Media, Ulama dan Negara: Opinion Leader dan Invisible Power

Pada dataran wacana (diskursif), narasi testimonial ulama dalam vaksinasi masyarakat Aceh menarik untuk dikaji. Sikap yang mengedepankan halal dan haram vaksin menjadi penimbang masyarakat Aceh untuk sadar melakukan vaksin. Sebagaimana kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi menjadi salah satu tujuan dari komitmen Nasional pemerintah yang diarahkan bertujuan melahirkan kesehatan nasional yang baik. Jika dilihat dalam skema dialektik, ada dua skema yang ditetapkan dari relasi antara media, ulama dan pemerintah dalam narasi testimonial ulama terhadap vaksinasi masyarakat Aceh. Relasi ini seolah memperlihatkan Ulama sebagai “spokes man”, juru bicara pemerintah dalam bentuk persuasif, dan media sebagai pembangun opini publik. Jika diskemakan, dapat dilihat sebagai berikut:



Dalam relasi media, negara, dan ulama ada peran opinion leader yang memang signifikan mempengaruhi masyarakat. Ulama sebagai tokoh publik disatu sisi berperan sebagai spoken man, dan juga opinion leader, disisi lain juga membentuk opinion leader lainnya dengan pengaruh narasi yang dibangun. Rogers mendefinisikan konsep opinion leader sebagai sejauh mana seorang individu dapat muncul dan mempengaruhi individu lain pada frekuensi tertentu melalui sikap atau perilaku yang dianggap tepat. Rogers dan Cartonno juga mengkarakteristikan

seorang opinion leader sebagai orang yang memberikan contoh sebuah nilai kepada orang-orang yang mengikutinya.(Efendi et al., 2020).

Abu Manan mengatakan, baliho yang terpasang kadang memang mengutip langsung bahasa yang benar-benar darinya. Namun ada juga kalimat telah diedit sesuai maksud pemasang baliho. Artinya, meskipun tidak meminta izin, namun sejauh itu bermanfaat bagi masyarakat, didukung penuh oleh Abu Manan. (Wawancara dengan Abu Manan). Selain itu, para ulama juga menjadi juru bicara pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat. Meskipun tidak secara resmi, namun hal ini dilakukan oleh ulama untuk mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan vaksinasi. “tidak hanya melalui Baliho yang dipasang oleh pemerintah, kami juga sering menyampaikan dalam berbagai majelis, mengedukasi masyarakat untuk berikhtiar melakukan vaksinasi agar dapat mengatasi penyebaran virus corona. Sejahter itu bermanfaat untuk masyarakat, kami siap melakukannya. (Wawancara dengan Waled Nuruzzahri).

Masyarakat memang memiliki sikap pro dan kontra terhadap vaksin. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat Aceh tentang vaksin yang beragam. Bagi masyarakat yang pro tentu akan melakukan vaksinasi, sebaliknya yang kontra akan selalu menolak untuk di vaksin. Namun ulama mampu memberi pandangan lain bagi masyarakat. Karena ulama memiliki kekuatan tersembunyi yang mampu menggerakkan massa.

B. Konstruksi Media terhadap narasi testimonial Ulama dayah terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh

Konstruksi realitas media bukanlah suatu kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan yang nyata, melainkan sudah mengalami perubahan dari realita yang terjadi menjadi realitas yang di konstruksi oleh media. Dalam proses konstruksi media melewati berbagai hal sebelum dipublikasikan kepada khalayak. Dalam proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media tidak terlepas dari ideologi media yang berperan dalam pembentukan realitas media. Terdapat beberapa pengertian mengenai ideologi. Pertama, ideologi sebagai kepercayaan atau sikap suatu kelompok yang tidak datang dari diri sendiri melainkan dibangun dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kedua, ideologi sebagai kepercayaan yang

sengaja di rekayasa atau kesadaran palsu yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi dan mendominasi kelompok lain. Ketiga, ideologi sebagai proses umum produksi dari makna dan ide yang digunakan untuk memproduksi makna. Anggoro dalam jurnalnya yang berjudul *Media, Politik dan Kekuasaan* mengatakan bahwa ideologi media berbanding lurus dengan pemilik media atau pemegang saham terbesar dari media sehingga memiliki potensi besar adanya penyalahgunaan kepentingan menggunakan media sebagai alat untuk meraup keuntungan secara pribadi dalam bentuk apapun. (Rohman, 2022)

Secara prinsip, media dituntut untuk independen dan bebas dari pengaruh dan intervensi manapun. Namun sampai saat ini, belum ada yang mampu menjamin independensi media yang bebas dari intervensi. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika terjadi fenomena yang sama. Pengaruh pemilik modal biasanya mengganggu netralitas dan independensi media. Media sering mengalami tekanan politik dan ekonomi. (Negara & Rusadi, 2020). Fenomena ini juga berlaku dalam konstruksi berita anjuran Vaksinasi di Indonesia dan Aceh khususnya. Berikut beberapa Screenshoot pemberitaan vaksinasi di Aceh yang diambil pada media serambinews.com. Hanya saja dalam pemberitaan di media Serambi Indonesia, Pemred Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur mengatakan bahwa “bagi kami tidak ada perhatian khusus terhadap berita-berita yang menyangkut Covid 19. Akan tetapi jika kami menganggap, bahwa peristiwa tersebut layak diberitakan dan perlu diketahui oleh masyarakat luas, maka kami akan melakukan peliputan dan pemberitaan mengenai peristiwa tersebut”. (Wawancara dengan Zainal Arifin Pemred Serambi Indonesia).

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Yusmaddin Idris, selama ini peliputan terkait Covid 19, baik itu vaksin maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan covid 19 kami lakukan seperti peliputan berita lainnya. Artinya tidak ada perlakuan khusus, apalagi intervensi pemerintah untuk mengkontruksi berita Vaksin. (Wawancara dengan Yusmaddin Idris Kabiro Serambi Indonesia Bireun).



Seperti berita tersebut di atas, Serambi Indonesia memberitakannya karena memang layak untuk diberitakan dan memenuhi semua unsur berita. Peliputan ini dilakukan secara profesional dan mengindahkan etika jurnalistik. (Wawancara dengan Pemred Serambi Indonesia).



Berita Abu Mudi ini di olah dari video viral di media sosial. Video ini layak untuk diberitakan karena memang memiliki unsur komersil sebuah pemberitaan. Yusmaddin mengatakan bahwa dirinya memang pernah diundang dalam kegiatan vaksinasi, namun tidak ada paksaan atau intervensi untuk melakukan peliputan. Ini menandakan bahwa, berita vaksin yang dimuat dalam media Serambi Indonesia

adalah murni hasil liputan wartawan dengan mengindahkan etika jurnalistik dan mengedepankan prinsip profesionalisme jurnalistik. (Wawancara dengan Yusmaddin, Kabiro Serambi Indonesia Bireun).



Serambi Indonesia, menyoroti isu yang terjadi di sekitar masyarakat pada saat program vaksinasi sedang berlangsung. Sesuai dengan tujuan dari media yakni sebagai pusat informasi bagi masyarakat serta menjadi *watch dog* bagi pemerintahan. Artinya, berita vaksin yang terjadi di Aceh, apakah itu dari anjuran ulama ataupun bukan, menurut Jafaruddin dilakukan secara profesional, adil dan berimbang tanpa ada doktrin ideologi lain. (Wawancara dengan Jafaruddin, Kabiro Serambi Indonesia Lhokseumawe). Tidak hanya mengangkat isu seputar perkembangan vaksin juga memberitakan hal yang terjadi akibat dampak dari program pemerintahan tersebut.

Serambi Indonesia menonjolkan isu mengenai perkembangan dari program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintahan untuk menyelamatkan Indonesia dari wabah covid-19. Serambi Indonesia juga menyoroti permasalahan eksternal yang memiliki potensi untuk menghambat juga menggagalkan program vaksin tersebut, juga memberitakan seputar perkembangan vaksinasi yang sedang berjalan.

C. Respons masyarakat Aceh terhadap konstruksi media massa dalam testimonial Ulama Dayah Aceh terkait Vaksinasi Covid 19

Nazrul Zaman, sebagai pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa, Pemerintah perlu mengoptimalkan keterlibatan aktif para ulama, ustaz, pimpinan dayah, dan imam masjid dalam meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di Aceh. Nasrul menjelaskan masih banyak masyarakat Aceh yang belum percaya terhadap vaksin Covid-19 sehingga mereka enggan melakukan penyuntikan ke sentra vaksin. Apalagi saat ini banyak siswa dan orangtua siswa yang menolak untuk divaksin Covid-19. Oleh karena itu, kehadiran ulama sangat penting sebagai tokoh kharismatik yang dapat mempengaruhi masyarakat Aceh.

Bagi masyarakat Aceh ulama dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu ulama dayah dan ulama luar dayah. Sebagian besar masyarakat, memosisikan ulama dayah sebagai tokoh panutan. Ulama dayah merupakan rujukan dalam pengamalan segala perintah agama, bahkan dalam kalangan tertentu melebihi batas-batas yang dibenarkan oleh agama.(Abdul Wahid, 2013)

Sementara ulama luar dayah, memiliki penilaian yang berbeda. Untuk menandakan latar belakang para ulama tersebut, dapat juga dilihat dari panggilan yang ditabalkan oleh masyarakat kepada mereka, seperti: Kiyai (pulau Jawa). Lebih jauh, Misri A. Muhshin menyatakan bahwa teungku merupakan salah satu golongan elit di Aceh. Mereka selain sebagai orang yang memimpin dalam bidang agama, juga menguasai semua persoalan agama. Jabatan mereka berhubungan dengan agama, sekaligus orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Gelar yang mereka sandang bukan berdasarkan anugerah dari penguasa, dan bukan karena warisan. Tetapi ia muncul dalam peredaran sejarah sosial Aceh atas prestasi ilmu dan ketekunan belajar serta kerja di bidangnya. Artinya prestise ini merupakan pemberian masyarakat. Prestise ini pun memiliki arti yang sangat berharga dibandingkan gelar formil dari bangku pendidikan formal.(Abdul Wahid, 2013).

Secara umum, paling tidak ada 4 peran strategis ulama di negara antara lain: Sebagai sumber kekuatan moral spiritual; Sebagai agen sosialisasi Islam; Sebagai pelopor pembaharuan Islam; dan Sebagai sumber kekuatan ikatan solidaritas umat. Peran strategis ini yang memiliki relasi kuasa dengan pemerintah untuk

menyatukan umat dalam menerima vaksin. Berikut respon masyarakat terkait narasi Testimonial Vaksinasi ulama:

5. Respons Kuasa Pengetahuan

Sejumlah media pernah memberitakan ulama memfatwakan vaksinasi atau imunisasi itu haram dengan sejumlah alasan, mulai dari ancaman zat mengandung unsur babi hingga isu politik Yahudi. Alhasil, fatwa ini menimbulkan pro kontra yang membuat sebagian masyarakat bingung dan menolak imunisasi karena takut berdosa. Faktanya, fatwa yang mengharamkan imunisasi tidak memiliki dasar yang kuat dan jelas serta justru menyesatkan dan merugikan umat Islam. Mereka yang memfatwakan imunisasi itu haram justru sedang merusak atau melemahkan generasi Islam di masa yang akan datang. Berikut beberapa berita terkait halal haram Vaksin Secara Nasional:

No	Judul Berita	Media
1	Fatwa MUI: Vaksin Covid Covovax Haram	CNN Indonesia
2	Ini Daftar 5 Vaksin Covid-19 yang Haram, Tapi Aman Digunakan	CNBC Indonesia
3	MUI Jelaskan Hukum Vaksin Haram Kalau Sudah Ada Vaksin Halal	Tempo
4	Soal Vaksin Covid-19, MPU Aceh Sepakat Ikuti Fatwa MUI	https://dinkes.acehprov.go.id/
5	Terkait Hukum Vaksin Sinovac, MPU Aceh: Jangan Pernah Ragukan Fatwa MUI	Serambinews.com
6	MPU Aceh Selatan Dukung Vaksinasi Covid-19, Tgk Armia: Fatwa MUI Vaksin Sinovac Halal dan Suci	Serambinews.com
7	MUI Baru Keluarkan Fatwa Tentang Vaksin Haram, Ini Fakta Seputar Imunisasi MR	Serambinews.com
8	MUI Tegaskan Vaksin Covid-19 CanSino Asal China Haram Digunakan, Mengandung Sel Embrio Bayi.	Serambinews.com
9	MPU dan Ulama Aceh Sepakat Ikut Fatwa MUI , Soal Vaksinasi Covid-19 Halal	Serambinews.com
10	Ketua MUI Bantah Fatwa Halal Vaksin Sinovac Adalah Pesanan, Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah	Serambinews.com

Mukhtar, salah satu masyarakat Aceh Barat daya mengatakan bahwa selama ini masyarakat bimbang dengan kesucian vaksin, kehalalaln dan keharaman vaksin. Serta bimbang dengan beragamnya fatwa ulama tentang hala dan haram vaksin. Pro kontra ini menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk bersedia di vaksin. (Wawancara dengan Mukhtar Warga Abdiya). Senada dengan Mukhtar, Rahmat warga kota lhokseumawe juga membenarkan bahwa, berkembangnya isu apakah itu hoaks maupun bukan, terkait dengan halal dan haramnya vaksin sinovac menjadi perhatian tersendiri bagi masyaraakt untuk melakukan vaksin. Beberapa warga Lhokseumawe terlihat enggan melakukan vaksin, karena takut akan keselamatn dan hukum vaksin itu sendiri. (Wawancara dengan Rahmat Abu Bakar).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di tempat Vaksinasi Lapangan Hiraq kota Lhokseumawe, tidak banyak warga yang ikut berpartisipasi dalam melakukan vaksinasi. Hal ini disebabkan oleh masih ragu dalam hal keselamatan jiwa, juga khawatir terkait kejelasan hukum Islam menggunakan Vaksin. Muhammad Nasrullah mengatakan bahwa pemeritaan terkait vaksinasi halal haram, mempengaruhi masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Edukasi pentingnya vaksin sepertinya perlu digalakkan oleh pemerintah agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. (Wawancara dengan Muhammad Nasrullah Masyarakat Lhokseumawe).

Azwani salah satu warga kabupaten Bireun juga mengatakan hal yang sama, pengetahuan masarakat tentang pentingnya vaksin, serta hukum vaksin menjadi pemantik utama masyarakat untuk melakukan vaksin. Ketidak tahuan akan penntingnya vaksin, serta penyebaran hoaks tentang bahaya vaksin menjadikan masyarakat Aceh malas dan tidak berani untuk melakukan vaksinasi. (Wawancara dengan Azwani Bireun).

Abdul Mukti, salah satu masyarakat Aceh Timur berpendapat hoaks tentang bahaya vaksin, serta vaksin adalah senjata Yahudi untuk membunuh masyarakat Aceh telah berkembang pada masyarakat. Sehingga perlu kiranya peran ulama untuk mencounter isu ini. Testimoni ulama atau fatwa ulama sangat mempengaruhi masyarakat Aceh untuk melakukan vaksin. (Wawancara dengan Abdul Mukti, Aceh Timur).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Pengetahuan masyarakat terkait testimoni vaksin oleh ulama Aceh mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk melakukan vaksin. Secara kognitif, pengetahuan masyarakat Aceh tentang vaksin, baik yang didengarkan secara langsung, maupun yang dibaca dan dilihat pada media massa menimbulkan pro dan kontra sesuai dengan interpretasi pengetahuan. Kuasa pengetahuan ini secara stimulus respon berimplikasi pada perubahan sikap masyarakat dan aplikasi dalam tindakan untuk bersedia melakukan vaksin.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa yang terbentuk dari ketiga aktor Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Dayah Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh ini berasal dari sinergi antara media, Negara (pemerintah Aceh) dan ulama serta partisipasi oleh masyarakat. Terdapat relasi antara ulama dan negara baik dalam bentuk invisible power dan Power Knowledge serta kontestasi opinion leader bekerja pada relasi antara media, negara dan ulama dalam narasi vaksinasi. Interaksi yang terjadi ulama, negara dan masyarakat lebih bersifat kolaboratif dan saling menguntungkan (simbiosis interaksionis). Bekerjanya relasi kuasa pada Media, Negara dan Ulama dalam Narasi Testimonial Ulama Terhadap Vaksinasi Masyarakat Aceh menggunakan, Power Knowledge dan opinion leader serta invisible power agar sadar melakukan vaksin. Relasi yang terbentuk anatar Ulama dan Masyarakat lebih bersifat kolaboratif dan saling mendukung satu sama lain dan bersifat asosisatif. Konstruksi berita vaksinasi masyarakat Aceh pada media serambi Indonesia tidak memiliki relasi kuasa dengan pemerintah, disebabkan tidak ditemukannya intervensi pemberitaan mengenai Covid 19. Kuasa pengetahuan menjadi respon masyarakat Aceh untuk melakukan vaksin. Stimulus kuasa pengetahuan mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat.

B. Saran

Pemerintah diharapkan melaksanakan tugas dan fungsinya secara akomodatif, asosiatif dan kolaboratif dalam upaya vaksinasi masyarakat Aceh. Dalam melaksanakan fungsinya diharapkan menghargai semua pihak terutama media dan ulama untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Masyarakat juga diharapkan proaktif dalam merespon berbagai kebijakan relasi kuasa negara dalam melaksakan vaksinasi dengan menghormati independensi media dan kharismatis ulama.

Daftar Pustaka

- Ashaf, A. F. (2017). Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, 8(2), 205–218. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5371>
- Asril, S. (2013). Narasi Sebagai Agen Politik: Seduksi Narrative Empire dalam Bingkai Hegemoni Intertekstualitas. Sebuah Respon Islami. *Dakwah Tabligh*, 14(2), 227–238. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/77292-ID-narasi-sebagai-agen-politik-seduksi-narr.pdf>
- Eriyanto. (2005). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/SA.V14I2.4062>
- Foucault, M. (2002). *Power/Knowledge : Wacana Kuasa/ Pengetahuan*. Jakarta: Bentang Budaya.
- Hudaeri, M. (2018). Menciptakan Muslim Modern: Relasi Kuasa Islam dan Negara Indonesia Modern. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2). <https://doi.org/10.30821/MIQOT.V41I2.405>
- K. Bertens. (2001). *Filsafat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Kebung, K. (2017). Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia. *MELINTAS*, 33(1), 34–51. <https://doi.org/10.26593/MEL.V33I1.2953.34-51>
- Negara, S. B., & Rusadi, U. (2020). Dinamika Relasi dan Kuasa Negara dalam Produksi Konten di Media Siber Pemerintah Menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(1), 57–72. <https://doi.org/10.31445/JSKM.2020.2425>
- Nugroho, C. (2018). Relasi Kuasa Media dan Isu Gender dalam Program Televisi di Indonesia. *ProTVF*, 2(2), 111–126. <https://doi.org/10.24198/PTVF.V2I2.20816>
- Nurudin. (2014). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucolt. *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 18(2). Retrieved from <http://202.0.92.5/adab/thaqafiyat/article/view/1316>

- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155. <https://doi.org/10.14421/REF.2018.1802-02>
- Syahputra, I. (2017). Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault. *Jurnal SPIKOM*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i1.4>